

ABSTRAK

Pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe yang masih mengandalkan sistem konvensional berupa "kumpul, angkut, buang", yang menimbulkan permasalahan seperti meningkatnya volume sampah setiap tahun dan kondisi TPA yang mengalami kelebihan kapasitas. Situasi ini memerlukan alternatif pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Meskipun pemerintah telah menetapkan Qanun Nomor 9 Tahun 2015 serta mendirikan Bank Sampah sebagai solusi berbasis ekonomi sirkular, implementasi kebijakan tersebut belum memberikan hasil yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah melalui Bank sampah di Kota Lhokseumawe dari aspek tanggung jawab dan manfaat, serta mengupas secara mendalam faktor-faktor penghambatnya dengan fokus pada standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi, dan sikap para pelaksana. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, implementasi kebijakan pengelolaan sampah dari aspek tanggung jawab pemerintah telah menunjukkan komitmen formal melalui regulasi dan pendirian Bank Sampah, namun pelaksanaannya belum didukung oleh fasilitas, sistem operasional, dan partisipasi masyarakat yang memadai. Dari aspek manfaat, kebijakan belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan, meskipun terdapat indikasi perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah. Kedua, faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut meliputi: (1) standar dan sasaran kebijakan yang belum dipahami secara seragam, (2) keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, (3) komunikasi antar organisasi yang belum sistematis, dan (4) sikap pelaksana yang belum sepenuhnya memahami teknis dan substansi kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan, Sampah, Kota Lhokseumawe

ABSTRACT

Waste management in Lhokseumawe City still relies on a conventional system of "collect, transport, dispose," which has caused problems such as the increasing volume of waste each year and the landfill (TPA) reaching overcapacity. This situation requires a more effective and sustainable management alternative. Although the government has enacted Qanun Number 9 of 2015 and established Waste Banks as a circular economy-based solution, the implementation of these policies has not yet yielded optimal results. This study aims to identify and understand the implementation of waste management policies through Waste Banks in Lhokseumawe City from the perspectives of responsibility and benefits, as well as to thoroughly examine the inhibiting factors, focusing on policy standards and targets, resources, inter-organizational communication, and the attitudes of implementers. The research method used is qualitative with a descriptive approach, where data were collected through interviews, observations, and documentation. The results reveal two main findings. First, the implementation of waste management policies from the government's responsibility aspect has shown formal commitment through regulations and the establishment of Waste Banks; however, the execution is not yet supported by adequate facilities, operational systems, and community participation. From the benefits aspect, the policy has not produced significant economic impact, although there are indications of behavioral changes in the community regarding waste sorting. Second, the inhibiting factors in policy implementation include: (1) policy standards and targets that are not uniformly understood, (2) limitations in human resources and infrastructure, (3) unsystematic inter-organizational communication, and (4) implementers' attitudes that do not fully comprehend the technical and substantive aspects of the policy.

Keywords: Implementation, Policy, Management, Waste, Lhokseumawe City